



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Zubaida Assaf

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan

Andi Zubaida Assaf

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Program :

Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Indikator Output/ Kegiatan	Target
1.	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU dengan grade B	B
a.		Perencanaan/ Program Penganggaran dan Pengendalian	5
b.		Pemantauan Analisa dan Evaluasi	4

1. **Kegiatan** Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
Anggaran Rp 2.419.296.000,-

Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Andi Zubaida Assaf



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Ariyanto

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan dari atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama
Kepala Biro Hukum, Humas dan
Kerjasama

Taufik Ariyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Program :

Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan	Indikator Output/ Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat	a. Diseminasi Informasi Publik dan Internal dan Hubungan Media	17
2.	Peningkatan pengakuan publik (nasional dan global atas KPPU) yang dinilai berdasarkan indeks persaingan usaha	a. Jumlah kerjasama dengan K/ L/ I / Pemda/ Perguruan Tinggi, eikutsertaan dalam konferensi nternasional, maupun menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional (* berdasarkan jumlah naskah kerjasama dengan K / L / I / Pemda / Perguruan Tinggi baik dalam bentuk Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama.	10
		b. Jumlah laporan terkait pelaksanaan hubungan luar negeri (* berdasarkan jumlah laporan kegiatan baik berdasarkan undangan ataupun mengundang	10
3.	Meningkatnya kualitas perangkat hukum internal	a. Jumlah pertimbangan/ opini hukum dan pendampingan hukum (* Jumlah keberhasilan untuk pemenangan proses di lembaga peradilan, legal drafting.	13

1. Kegiatan
Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat dan Penyusunan
Pranata Hukum

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Anggaran
Rp 7.764.399.000,

Jakarta, April 2018

Pimpinan Unit Kerja



Taufik Ariyanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Charles Pandji Dewanto

Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama

Kepala Biro Organisasi dan SDM

Charles Pandji Dewanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Program :

Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan	Target	Target
1.	Peningkatan persentase Reformasi KPPU Indeks Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	55%
2.	Meningkatnya kualitas SDM, Tata Organisasi dan Layanan Operasional	a. Perencanaan dan Pengembangan Tata Kelola Organisasi dan SDM	3
		b. Pelayanan Umum Kerumahtanggaan dan Operasional Teknis Internal (Survey)	1
		c. Pelayanan Umum Kerumahtanggaan Pimpinan dan Keprotokolan (Survey)	1
		d. Layanan Data dan Teknologi Informasi	1
		e. Kepuasan internal terhadap layanan Unit Data dan Informasi (Skala 1-5 : buruk – baik sekali)	Skala 2

1. Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Anggaran

Rp 63.015.824.000,-

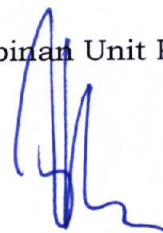
Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Charles Pandji Dewanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Ahmad

Jabatan : Direktur Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama
Direktur Pengkajian, Kebijakan dan
Advokasi

Taufik Ahmad

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Program :

1. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat;
2. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan;
3. Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel.

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan	Output/ Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pemahaman Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	Jumlah Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	13
		a. Asistensi Penyelarasan Kebijakan Pemerintah (Kementerian/ Lembaga)	
		b. Asistensi Penyelarasan Kebijakan Pemerintah Daerah	
		c. Sosialisasi Manual Kebijakan Persaingan Usaha	
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha	22
		a. Penyelenggaraan Kuliah Umum Persaingan Usaha	
		b. <i>Training for trainer</i> kepada dosen pengajar mata kuliah persaingan usaha	
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU *) dihitung dari jumlah total pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi program kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999	37
		a. Sosialisasi Program Kepatuhan (<i>Compliance Program</i>)	1

4.	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah	a. Kajian Sektor Strategis	13
		b. Survey Pasar/ <i>Market Study</i>	23
		c. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pengawasan Pelaku Usaha	
		d. Partisipasi dalam Tim Pengawasan di Pusat dan Daerah	
5.	Peningkatan pengakuan public (nasional dan global atas KPPU) yang dinilai berdasarkan indeks persaingan usaha	a. Peningkatan Indeks Persaingan Usaha	1

1. Kegiatan

Pengkajian/kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha

Anggaran

Rp. 12.597.700.000,-

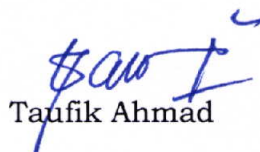
Jakarta, April 2018

Pimpinan Unit Kerja

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha



Taufik Ahmad



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswin Nur

Jabatan : Direktur Merger

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama
Direktur Merger

Deswin Nur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Program :

1. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat;
2. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan	Output/ Kegiatan	Target
1.	Peningkatan pemahaman terhadap pelaku usaha merger dan akuisisi	Sosialisasi dan Harmonisasi Merger dan Akuisisi dengan Otoritas Terkait	2
2.	Peningkatan pengawasan merger	Notifikasi Merger dan Akuisisi	60
		Penilaian Merger dan Akuisisi	40
		Monitoring dan Evaluasi Merger dan Akuisisi	16

1. Kegiatan

Pengawasan Merger dan Akuisisi

Anggaran

Rp. 4.700.000.000,-

Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja

Deswin Nur



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Sani Ardi

Jabatan : Direktur Pengawasan Kemitraan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Kemitraan

Dedy Sani Ardi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Program :

3. Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan pemerintah;
4. Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan.

No.	Indikator Kinerja	Output/ Kegiatan	Target
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	Sosialisasi Perkom 01/2017 Revisi Perkom 01/2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan	12
2.	Pengawasan Kemitraan	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	8
3.	Peningkatan efektivitas kapasitas pengawasan kerjasama kemitraan	a. Penyusunan pedoman pengawasan kemitraan	2
		b. Pembaharuan, pengolahan dan pengembangan database kemitraan	1

1. Kegiatan
Pengawasan Kemitraan

Anggaran
Rp. 2.500.000.000,-

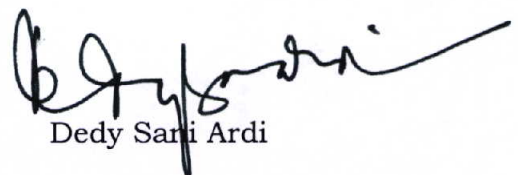
Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Jakarta, April 2018

Pimpinan Unit Kerja



Dedy Sari Ardi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyabudi Yulianto

Jabatan : Direktur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama

Setyabudi Yulianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Program			
1	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Presentase hasil penelitian/laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti di tahap penyelidikan	14%
		Presentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap Persidangan Majelis	27%
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha	Klarifikasi laporan pelanggaran persaingan usaha	80
		Penelitian inisiatif pelanggaran persaingan usaha	30
		Penyelidikan pelanggaran Persaingan Usaha	50

1. Kegiatan

Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat

Anggaran

Rp 8.080.400.000,-

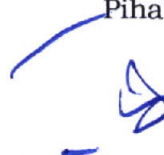
Jakarta, April 2018

Pihak Kedua



Kurnia Toha

Pihak Pertama



Setyabudi Yulianto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Goprera Panggabean

Jabatan : Direktur Penindakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama

Goprera Panggabean

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Program			
1	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	85%
		Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan	59%
		Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	10.000.000.000 (dalam Rupiah)
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang sehat	Pemberkasan perkara persaingan usaha	25
		Litigasi perkara persaingan usaha	10
		Eksekusi perkara persaingan usaha	17

1. Kegiatan

Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat

Anggaran

Rp 4.975.000.000,-

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua



Kurnia Toha

Pihak Pertama



Gopprera Panggabean



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hadi Susanto

Jabatan : Direktur Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama

M. Hadi Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Program			
1	Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	Presentase dibatalkannya Putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri sampai tahun berjalan dikarenakan pertimbangan hukum dari aspek formil (*) ratio seluruh Putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dibandingkan dengan seluruh Putusan KPPU sampai dengan tahun berjalan	50%
		Persentase dapat diteruskannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	85%
Sasaran Kegiatan			
1.	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha yang sehat	Penyusunan Doktrin Substansi Putusan dan Upaya Penguatan hukum acara persaingan usaha	1
		Persidangan Majelis/ Penanganan Perkara	25
		Penetapan / Putusan	24

1. Kegiatan

Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha

Anggaran

Rp 16.650.000.000,-

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua



Kurnia Toha

Pihak Pertama



M. Hadi Susanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siswanto

Jabatan : Kepala Satuan Pengawas Internal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama,
Kepala Satuan Pengawas Internal

Siswanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Program :

Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan		Target
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU	a. Laporan Pembinaan, Pengawasan Internal dan <i>Quality Assurance</i>	5
		b. Laporan Audit dan <i>Review</i>	7
		c. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi Pemantauan Kinerja	7

1. Kegiatan

Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Anggaran

Rp 1.360.714.000,-

Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Siswanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramli Simanjuntak

Jabatan : Kepala KPD Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama
Kepala KPD Medan

Ramli Simanjuntak

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Strategis #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target Output 2018
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	
	<i>Peningkatan Persentase Pemerintah Daerah Yang Telah Mendapatkan Sosialisasi</i>	
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	
	- Sosialisasi UU No 5/1999 dan atau Amandemen UU	0
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Pemerintah Daerah	2
	Jumlah Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan manual kebijakan persaingan usaha	
	- Sosialisasi/ToT Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (<i>Competition Checklist</i>) kepada Pemerintah Daerah	2
	- Evaluasi Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan terhadap Pemerintah Daerah yang telah mengikuti Sosialisasi	0
	- Evaluasi Kebijakan Pemerintah	2
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	
	<i>Persentase Peningkatan Perguruan Tinggi/Universitas/Pusdiklat Daerah yang telah mendapatkan Sosialisasi</i>	
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi	
	- Penyelenggaraan Kuliah Umum Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD	4
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Perguruan Tinggi	0
	- Pendampingan kegiatan Kuliah Umum yang dilaksanakan KPPU Pusat di wilayah kerja KPD	0
	Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan ToT Modul Persaingan Usaha	
	- ToT kepada dosen pengajar mata kuliah persaingan usaha	0

	- Pendampingan penyusunan kurikulum persaingan usaha	0
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	
	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sosialisasi</i>	
	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	
	- Sosialisasi UU NO. 5/1999 dan /atau amandemen UU No. 5/1999	1
	Jumlah peningkatan pelaku usaha yang telah menerapkan program persaingan usaha	
	- Audiensi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha	1
4.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap persaingan usaha yang sehat melalui peran media	
	<i>Rata-rata Jumlah Pemberitaan KPPU & Persiangan Usaha oleh Media di Wilayah Kerja KPD Medan per bulan *</i>	
	Jumlah pemberitaan persaingan usaha di media	
	- Sosialisasi UU Persaingan Usaha	0
	- Diseminasi melalui media visit	1
	- Melakukan Forum Jurnalis	3
Sasaran Strategis #2/5 : Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin investasi dan iklim usaha yang sehat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2017
5.	Klarifikasi laporan, penelitian perkara inisiatif dan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	<i>Persentase Jumlah Laporan dan atau penelitian inisiatif yang ditindaklanjuti</i>	
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti	
	- Klarifikasi laporan pengaduan	3
	- Penelitian/inisiatif	1
	Jumlah Kegiatan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	- Pendampingan kegiatan penegakan hukum di wilayah kerja KPD	1
Sasaran Strategis #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah		

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2017
6.	Peningkatan pemahaman pemerintah daerah/SKPD terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah SKPD terkait yang telah mendapatkan sosialisasi/rapat teknis tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pemerintah daerah/SKPD terkait	1
7.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pelaku usaha besar, mikro, kecil, menengah dan koperasi.	1
	- Forum diskusi dan pengumpulan data kemitraan dengan pelaku usaha	0
Sasaran Strategis #4/5 : Pengawasan Pelaku Usaha		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2017
8.	Pengawasan pelaku usaha	
	Terpetakannya struktur pasar	
	- Melakukan kajian indsutri strategis di wilayah kerja KPD	1
	Teridentifikasinya perilaku pelaku usaha	
	- Pemantauan harga/ <i>market study</i>	1
	- Ikut berpartisipasi dalam Tim Pengawasan di wilayah kerja KPD	1
9.	Pelaksanaan pengawasan kerjasama kemitraan	
	Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan yang telah diawasi	
	- Evaluasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	2
Sasaran Strategis #5/5 : Strategi penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2017
10.	Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Realisasi Anggaran dan Program	

Kegiatan		
Tersusunnya Laporan Kinerja		
-	Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan perencanaan, pemanfaatan anggaran belanja dan penyusunan laporan kinerja KPD Medan	1
11. Implementasi dan tindak lanjut Kerjasama (MoU)		
Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut kerjasama (MoU)		
-	Rapat koordinasi persiapan dan tindak lanjut MoU	1
12. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (pegawai) KPD Medan		
Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat		
-	Pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan kompetensi SDM KPD Medan	1
-	Pelaksanaan dan keikutsertaan dalam diklat	1
13. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dan bagian umum		
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang		
-	Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan umum dan pendukung.	1
TOTAL		33

No	Kegiatan	Anggaran
	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah	Rp. 1,826,500,000,-

Jakarta, Mei 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Ramli Simanjuntak



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dendy R. Sutrisno

Jabatan : Kepala KPD Surabaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama
Kepala KPD Surabaya

Dendy R. Sutrisno

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Strategis #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	
	Jumlah Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	
	- Sosialisasi UU No 5/1999 dan atau Amandemen UU	1
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Pemerintah Daerah	1
	Jumlah Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan manual kebijakan persaingan usaha	
	- Sosialisasi/ToT Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (<i>Competition Checklist</i>) kepada Pemerintah Daerah	1
	- Evaluasi Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan terhadap Pemerintah Daerah yang telah mengikuti Sosialisasi	1
	- Evaluasi Kebijakan Pemerintah	1
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi	
	- Penyelenggaraan Kuliah Umum Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD	3
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Perguruan Tinggi	1
	- Pendampingan kegiatan Kuliah Umum yang dilaksanakan KPPU Pusat di wilayah kerja KPD	1
	Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan ToT Modul Persaingan Usaha	
	- ToT kepada dosen pengajar mata kuliah persaingan usaha	1
	- Pendampingan penyusunan kurikulum persaingan usaha	1

3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	
	Jumlah Pelaku Usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/Amandemen UU	
	- Sosialisasi UU NO. 5/1999 dan /atau amandemen UU No. 5/1999	1
	Jumlah peningkatan pelaku usaha yang telah menerapkan program persaingan usaha	
	- Audiensi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha	1
4.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap persaingan usaha yang sehat melalui peran media	
	Jumlah pemberitaan persaingan usaha di media	
	- Sosialisasi UU Persaingan Usaha	1
	- Diseminasi melalui media visit	1
	- Melakukan Forum Jurnalis	2

Sasaran Strategis #2/5 : Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin investasi dan iklim usaha yang sehat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Klarifikasi laporan, penelitian perkara inisiatif dan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	Persentase hasil penelitian/laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	
	- Klarifikasi laporan pengaduan	3
	- Penelitian/inisiatif	1
	Jumlah Kegiatan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	- Pendampingan kegiatan penegakan hukum di wilayah kerja KPD	1

Sasaran Strategis #3/5 :Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah

No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah daerah/SKPD terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah SKPD terkait yang telah mendapatkan sosialisasi/rapat teknis tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pemerintah daerah/SKPD terkait	1

2.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pelaku usaha besar, mikro, kecil, menengah dan koperasi.	1
	- Forum diskusi dan pengumpulan data kemitraan dengan pelaku usaha	1

Sasaran Strategis #4/5 : Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Pengawasan pelaku usaha	
	Terpetakannya struktur pasar	
	- Melakukan kajian indsutri strategis di wilayah kerja KPD	1
	Teridentifikasinya perilaku pelaku usaha	
	- Pemantauan harga/ <i>market study</i>	1
	- Ikut berpartisipasi dalam Tim Pengawasan di wilayah kerja KPD	1
2.	Pelaksanaan pengawasan kerjasama kemitraan	
	Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan yang telah diawasi	
	- Evaluasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	2

Sasaran Strategis #5/5 : Strategi penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	Target
1.	Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Realisasi Anggaran dan Program Kegiatan	
	Tersusunnya Laporan Kinerja	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan perencanaan, pemanfaatan anggaran belanja dan penyusunan laporan kinerja KPD Surabaya	1

2.	Implementasi dan tindak lanjut Kerjasama (MoU)	
	Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut kerjasama (MoU)	
	- Rapat koordinasi persiapan dan tindak lanjut MoU	1
3.	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (pegawai) KPD Surabaya	
	Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan kompetensi SDM KPD Surabaya	1
	- Pelaksanaan dan keikutsertaan dalam diklat	1
4.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dan bagian umum	
	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan umum dan pendukung.	1

1. Kegiatan

Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

Anggaran

Rp. 1.926.500.000,-

Jakarta, Mei 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja

Dendy R. Sutrisno



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim Pasaribu

Jabatan : Kepala KPD Balikpapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama
Kepala KPD Balikpapan

Abdul Hakim Pasaribu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Strategis #1/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2018
1.	Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha	
	Jumlah Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan manual kebijakan persaingan usaha	
	- Sosialisasi/ToT Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (<i>Competition Checklist</i>) kepada Pemerintah Daerah	1
	- Evaluasi Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan terhadap Pemerintah Daerah yang telah mengikut Sosialisasi	1
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Pemerintah Daerah	1
2.	Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha	
	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Sosialisasi	
	- Penyelenggaraan Kuliah Umum Persaingan Usaha di wilayah kerja KPD	2
	- Audiensi UU Persaingan Usaha kepada Perguruan Tinggi	1
	- Pendampingan kegiatan Kuliah Umum yang dilaksanakan KPPU Pusat di wilayah kerja KPD	1
	Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan ToT Modul Persaingan Usaha	
	- ToT kepada dosen pengajar mata kuliah persaingan usaha	0
	- Pendampingan penyusunan kurikulum persaingan usaha	0
3.	Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan bagi pelaku usaha	
	Jumlah peningkatan pelaku usaha yang telah menerapkan program persaingan usaha	
	- Audiensi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha	0
4.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap persaingan usaha yang sehat melalui peran media	
	- Sosialisasi UU Persaingan Usaha kepada media	1
	- Diseminasi melalui media visit	1
	- Melakukan Forum Jurnalis	1

Sasaran Strategis #2/5 : Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin investasi dan iklim usaha yang sehat		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2018
1.	Klarifikasi laporan	
	Persentase jumlah laporan yang telah diklarifikasi	
	- Klarifikasi laporan pengaduan	3
2.	Pelaksanaan perkara inisiatif	
	- Penelitian perkara inisiatif	1
3.	Kegiatan pengawasan langsung/	
	- Pengawasan langsung/inspeksi/sidak persaingan usaha di wilayah kerja KPD	
4.	Kegiatan pendampingan kegiatan penegakan hukum	
	- Pendampingan kegiatan penegakan hukum di wilayah kerja KPD	1

Sasaran Strategis #3/5 : Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2018
1.	Peningkatan pemahaman pemerintah daerah/SKPD terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Jumlah SKPD terkait yang telah mendapatkan sosialisasi/rapat teknis tentang kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pemerintah daerah/SKPD terkait	1
2.	Peningkatan pemahamanpelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
	Terkumpulnya data perjanjian kerjasama kemitraan	
	- Sosialisasi pengawasan kemitraan kepada pelaku usaha besar, mikro, kecil, menengah dan koperasi	2

Sasaran Strategis #4/5 : Pengawasan Pelaku Usaha		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2018
1.	Terpetakannya struktur pasar	
	Pengawasan pelaku usaha	
	- Melakukan kajian indsutri strategis di wilayah kerja KPD	1
	- Ikut berpartisipasi dalam Tim Pengawasan di wilayah kerja KPD	1
2.	Pelaksanaan pengawasan kerjasama kemitraan	
	Jumlah kerjasama kemitraan yang telah diawasi	
	- Evaluasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	1
	- Forum diskusi dan pengumpulan data kemitraan dengan pelaku usaha	1

Sasaran Strategis #5/5 : Strategi penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel		
No.	Indikator Kinerja Kegiatan/Output/Kegiatan	2018
1.	Efektivitas perencanaan dan pemanfaatan anggaran belanja negara	
	Tersusunnya laporan akuntabilitas dan kinerja perencanaan dan pemanfaatan anggaran belanja negara	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan perencanaan, pemanfaatan anggaran belanja dan penyusunan laporan kinerja KPD Balikpapan	1
2.	Implementasi dan tindak lanjut Kerjasama (MoU)	
	Jumlah rekomendasi dan tindak lanjut kerjasama (MoU)	
	- Rapat koordinasi persiapan dan tindak lanjut MoU	1
3.	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (pegawai) KPD Balikpapan	
	Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat	
	- Pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan kompetensi SDM KPD Balikpapan	1
	- Pelaksanaan dan keikutsertaan dalam diklat	1

1. Kegiatan

Pengawasan Persaingan Usaha di
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan
Daerah

Anggaran

Rp. 1.826.500.000,-

Jakarta, Mei 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Abdul Hakim Pasaribu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aru Armando

Jabatan : Kepala KPD Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama
Kepala KPD Makassar

Aru Armando

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Program:

1. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat
2. Meningkatkan kepastian penegakan hukum untuk menjamin investasi dan iklim usaha yang sehat
3. Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha dan pemerintah
4. Pengawasan Pelaku Usaha
5. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pemerintah.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah terkait dengan kemitraan yang sehat	4
2.	Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha di kalangan pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah	Peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha	3
		Jumlah Akademisi yang telah mendapatkan <i>pelatihan (ToT)</i> Modul Persaingan Usaha	2
		Peningkatan pemberitaan terkait persaingan usaha melalui media kepada masyarakat	5
3.	Pengawasan Pelaku Usaha	Terkumpulnya data dan informasi terkait struktur pasar dari berbagai sektor strategis	3
4.	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang diawasi	4
5.	Meningkatnya Kepastian Penegakan Hukum Persaingan Usaha untuk Menjamin Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Sehat	Peningkatan hasil dan rekomendasi terkait kegiatan penyelidikan/litigasi/ eksekusi di wilayah kerja KPD	4

Kegiatan


Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

Anggaran

Rp. 1.826.500.000,-

Jakarta, Mei 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja


Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja


Aru Armando



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Muhari

Jabatan : Kepala KPD Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Mei 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama
Kepala KPD Batam

Akhmad Muhari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pemerintah.	Peningkatan pemahaman pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah terkait dengan kemitraan yang sehat	2
2.	Meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha di kalangan pelaku usaha ekonomi dan pemerintah daerah	Peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah terkait penggunaan daftar periksa persaingan usaha	1
		Peningkatan pemberitaan terkait persaingan usaha melalui media kepada masyarakat	2
3.	Pengawasan Pelaku Usaha	Terkumpulnya data dan informasi terkait struktur pasar dari berbagai sektor strategis	1
4.	Pengawasan Perjanjian Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang diawasi	2
5.	Meningkatnya Kepastian Penegakan Hukum Persaingan Usaha untuk Menjamin Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Sehat	Peningkatan hasil dan rekomendasi terkait kegiatan penyelidikan/ litigasi/ eksekusi di wilayah kerja KPD	3

1. Kegiatan

Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

Anggaran

Rp 1.826.500.000,-

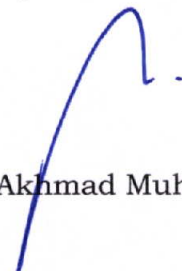
Jakarta, 3 Mei 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Akhmad Muhari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Isnani Husnayati

Jabatan : Kepala Unit Diklat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2018

Pihak Kedua,

Kurnia Toha

Pihak Pertama,
Kepala Unit Diklat

Sri Isnani Husnayati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sasaran Program :

Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja/ Output/ Kegiatan	Target	Target
1.	Meningkatnya kualitas SDM, Tata Organisasi dan Layanan Operasional	Perencanaan dan Pengembangan Tata Kelola Organisasi dan SDM	3

1. Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Anggaran

Rp 1.599.219.000,-

Jakarta, April 2018

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Kurnia Toha

Pimpinan Unit Kerja



Sri Isnani Husnayati



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Toha

Jabatan : Ketua KPPU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, April 2018

Ketua KPPU

Kurnia Toha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat	<p>Peningkatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap nilai-nilai Persaingan Usaha</p> <p>Jumlah Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang telah memperoleh sosialisasi UU No 5 Tahun 1999/ Amandemen UU</p> <p>Peningkatan pemahaman lembaga pendidikan dan kedinasan terkait persaingan usaha</p> <p>Jumlah Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan modul persaingan usaha</p> <p>Peningkatan pemahaman terhadap program kepatuhan persaingan dengan pelaku usaha</p> <p>Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi UU No. 5 Tahun 199 / Amandemen UU</p>	<p>Persaingan</p> <p>35</p> <p>22</p> <p>70%</p>
2.	Meningkatnya kepastian penegakkan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat	<p>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha</p> <p>Persentasi hasil penelitian/ laporan yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan</p> <p>Persentase laporan hasil penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap persidangan Majelis</p> <p>Meningkatnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat</p> <p>Presentase peningkatan jumlah persidangan majelis</p>	<p>14%</p> <p>27%</p> <p>7%</p>

		Persentase dapat diserahkannya salinan Putusan dan Putusan diakses secara online kepada para terlapor dalam 14 hari kerja setelah pembacaan Putusan KPPU	85%
		Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU	85%
		Persentase dikuatkannya Putusan KPPU pada tahap Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung sampai dengan Tahun Berjalan.	59%
		Jumlah penerimaan denda persaingan usaha yang disetorkan ke kas Negara di tahun berjalan	Rp 6 Milyar
3.	Peningkatan internalisasi nilai-nilai kerjasama kemitraan yang sehat di kalangan pelaku usaha dan pemerintah	Peningkatan pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
		Jumlah Pemerintah yang telah memperoleh sosialisasi Perkom 1 tahun 2015	9
		Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang prinsip kerjasama usaha kemitraan yang sehat	
		Jumlah pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kerjasama kemitraan	9
4.	Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha dan pengawasan kemitraan	Peningkatan pengawasan merger	
		Jumlah pelaku usaha yang melaporkan notifikasi merger	106
		Peningkatan efektivitas pengawasan pelaku usaha	

		Terpetakannya struktur pasar industri strategis	5
		Peningkatan efektivitas pengawasan kerjasama kemitraan	
		Jumlah kerjasama kemitraan yang telah diawasi antara pelaku usaha besar, koperasi, mikro, kecil dan menengah	8
5.	Penguatan kelembagaan KPPU yang kredibel dan akuntabel	Tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan realisasi anggaran dan program kegiatan	
		Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU dengan grade B	B
		Peningkatan persentase Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPPU	-
		Peningkatan pengakuan publik (nasional dan global atas KPPU) yang dinilai berdasarkan indeks persaingan usaha	
		Peningkatan Kualitas Kerjasama	60%
		Efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran belanja negara	
		Tercapainya opini laporan keuangan oleh BPK	WTP
		Terbentuknya basis data dan pedoman pengawasan kemitraan	
		Penyusunan Guideline Pengawasan Kemitraan	3

		Pengembangan Data dan Informasi Kemitraan	1
--	--	---	---

1. Program
Pengawasan Persaingan Usaha

Anggaran
Rp. 137.265.000.000,-

Jakarta, April 2018

Ketua KPPU



Kurnia Toha